

Skor Index Keterbukaan Anggaran dari-100-

81-100 Extensive

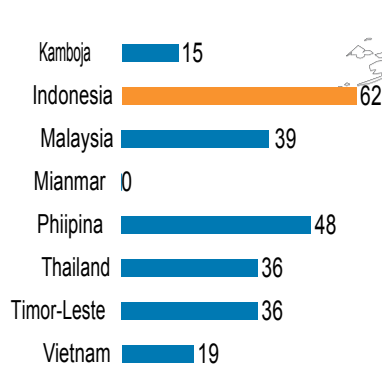
61-80 Substantial

41-60 Some

21-40 Sedikit

0-20 Kurang

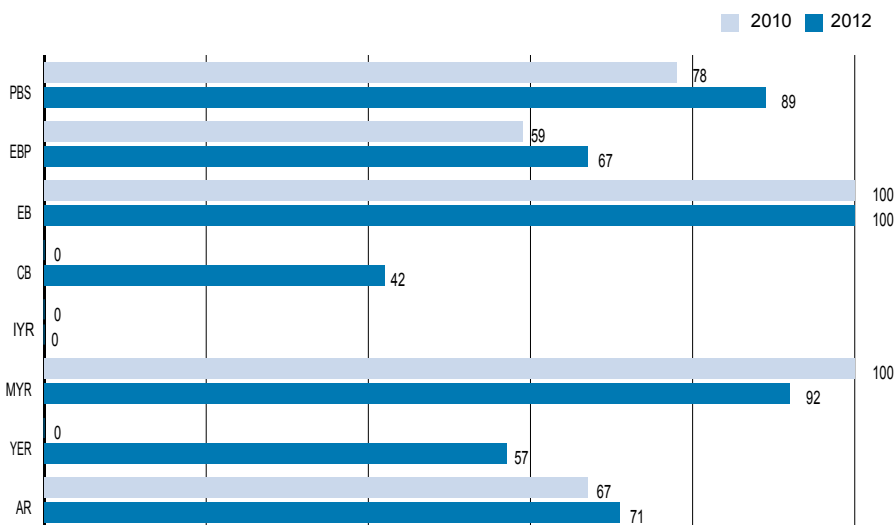
Bagaimanakah Indonesia jika dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara?



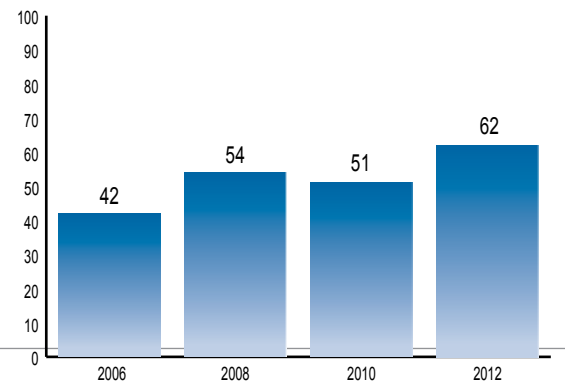
Delapan Dokumen Kunci Penganggaran dan Apakah Masyarakat Bisa Mengaksesnya?

Dokumen	Penjelasan Dokumen	Status Publikasi
PBS	Pre-Budget Statement: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Menyediakan informasi yang menghubungkan antara kebijakan dan biasanya ditetapkan dalam parameter yang luas/umum yang akan akan dijelaskan untuk disampaikan kepada legislatif.	Dipublikasikan
EBP	Executive's Budget Proposal: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Menjelaskan rencana pemerintah dalam meningkatkan pendapatan melalui pajak dan sumber lainnya dan anggaran yang dialokasikan untuk program prioritas, dan juga mentransformasikan kebijakan dalam bentuk kegiatan	Dipublikasikan
EB	Enacted Budget: Nota Keuangan dan UU APBN Instrumen sah yang memberikan otoritas kepada eksekutif untuk meningkatkan pendapatan, pembelanjaan dan hutang	Dipublikasikan
CB	Citizen Budget: Penyajian sederhana untuk memudahkan publik secara luas memahami rencana pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan dan mengalokasikan anggaran untuk mencapai tujuan kebijakan	Dipublikasikan
IYR	In-Year Reports: Laporan Realisasi Anggaran Secara periode (bulanan atau kuartal) untuk mengukur trend realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang bisa dibandingkan dengan gambaran awal anggaran dan penyesuaiannya.	Dibuat hanya untuk internal
MYR	Mid-Year Review: Laporan Pelaksanaan APBN Semester I Ringkasan realisasi anggaran pada tengah semester pada tahun berjalan dan perubahan pada asumsi ekonomi makro yang berpengaruh pada kebijakan anggaran	Dipublikasikan
YER	Year-End Report: Informasi yang membandingkan antara realisasi pelaksanaan anggaran dengan anggaran yang ditetapkan	Dipublikasikan
AR	Audit Report: Laporan Audit Evaluasi independen terhadap anggaran pemerintah yang dilakukan oleh badan audit (BPK) yang biasanya menilai apakah eksekutif meningkatkan pendapatan dan menggunakan anggaran sesuai dengan wewenang penganggaran, dan apakah anggaran pemerintah, pendapatan dan pengeluarannya yang sesuai dan adanya gambaran situasi fiskal yang dapat dipercaya.	Dipublikasikan

Dari Nol ke- 100: Sudahkah Indonesia Meningkatkan Ketersediaan Jumlah Informasi pada 8 dokumen kunci anggaran?



Skor OBI Selama Empat Survey



Index Keterbukaan Anggaran

Survey keterbukaan Anggaran ini menilai apakah pemerintah pusat di setiap negara yang disurvei membuat delapan dokumen kunci anggaran yang disediakan kepada publik dan juga data tersebut berisi dokumen yang lengkap, tepat waktu dan bermanfaat. Untuk menilai transparansi anggaran pada setiap Negara, survey ini menggunakan kriteria internasional yang dikembangkan oleh organisasi multi pihak seperti International Monetary Fund (IMF), organisasi untuk pengembangan koperasi dan pembangunan (OECD), dan Lembaga Audit International (INTOSA).

Skor Indonesia adalah 62 dari 100, dimana lebih tinggi dari skor rata-rata 43 dari 100 negara yang disurvei dan tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Skor Indonesia menunjukkan pemerintah menyediakan kepada publik informasi penting pada anggaran pemerintah nasional dan aktivitas keuangan selama tahun penganggaran. Ini membuka ruang bagi masyarakat untuk meminta akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan publik.

Skor Indonesia 62 pada OBI 2012, lebih tinggi dari pada OBI 2010 dengan skor 51

Indeks keterbukaan anggaran terdiri dari sub skor untuk delapan kunci dokumen anggaran yang dinilai dalam survey. Sub skor tersebut menunjukkan rata-rata skor yang diperoleh dari beberapa pertanyaan pada survey yang mengukur ketersediaan bagi publik dan jumlah informasi dalam dokumen. Sub skor dapat dibandingkan pada seluruh negara yang survey.

Rekomendasi

Skor Indonesia pada indeks keterbukaan anggaran (OBI) meningkat ditahap awal survey keterbukaan anggaran ini. Skor Indonesia adalah 62 dari 100 di OBI tahun 2012 dan ini adalah skor yang bagus, namun pemerintah Indonesia memiliki potensi untuk lebih meningkatkan transparansi anggaran melalui beberapa ukuran yang digunakan.

International Budget Partnership (IBP) merekomendasikan Indonesia melakukan beberapa langkah dalam meningkatkan keterbukaan anggaran:

- Membuat dan mempublikasikan Laporan tahun berjalan dimanasaat ini dibuat hanya untuk keperluan internal saja (petunjuk detail tentang isi dokumen bisa dilihat di buku panduan ini: <http://bitly/QGzHv8>). Seperti yang dilaporkan dalam open budget survey tahun 2012, 78 negara mempublikasikan laporan tahunan, termasuk negara tetangga Indonesia Kamboja, Malaysia, Pilipina, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste. Link untuk dokumen anggaran yang dipublikasikan oleh negara-negara tersebut bisa di akses melalui website IBP <http://bit.ly/P8NOV>.

Skor 95 dari 125 pertanyaan survey keterbukaan anggaran digunakan untuk menghitung skor secara objektif dan rangking transparansi dari setiap negara yang disurvei. Gabungan skor tersebut merupakan satu-satunya indeks keterbukaan anggaran (OBI) yang independen dan membandingkan keterbukaan anggaran antar negara.

- Untuk meningkatkan kelengkapan proposal anggaran eksekutif RAPBN, secara spesifik secara fokus menyediakan informasi sebagian berikut:

- Belanja program individu untuk anggaran tahunan dan untuk anggaran tahun sebelumnya, termasuk informasi detail belanja dan perhitungan pendapatan yang mencakup periode lebih dari satu tahun (lihat pertanyaan 4, 6, 10 dan 21 di pertanyaan keterbukaan anggaran-OB).

- Menyediakan informasi detail tentang komposisi hutang pemerintah (lihat pertanyaan 13 pertanyaan keterbukaan anggaran-OB).

- Menyediakan informasi anggaran yang setidaknya-tidaknya menunjukkan bagaimana perbedaan antara usulan kebijakan dengan kebijakan yang berlaku berdampak pada belanja dan pendapatan, hubungan arah kebijakan anggaran dengan data non keuangan dan kinerja untuk anggaran setiap program, dan informasi yang ditujukan kepada penerima manfaat secara langsung (lihat pertanyaan 16, 17 dan 49, 55 -OBI).

- Meningkatkan kelengkapan laporan akhir tahun anggaran dengan menjelaskan perbedaan antara estimasi awal data non keuangan, indikator awal, dan tingkat realisasi anggaran yang ditujukan untuk memberi manfaat kepada masyarakat miskin dan realisasi hasilnya, serta hasil daridana non bujeter (lihat pertanyaan 83, 86, di kuesioner OBI).

- Meningkatkan kelengkapan laporan audit dengan mengumumkan ke publik dana non bujeter dan menyampaikan ke publik, langkah-langkah yang telah dilakukan dalam menindaklanjuti rekomendasi laporan audit. (lihat pertanyaan 91 dan 95 di pertanyaan OBI).

- Meningkatkan kualitas citizen budget (anggaran warga) dengan mengkonsultasikan kepada publik, memperkenalkan terlebih dahulu ke publik dengan membuat anggaran untuk masyarakat dalam perencanaan anggaran dan realisasi (lihat pertanyaan 111 dan 112 di pertanyaan OBI)

Kekuatan Legislatif dan Badan Audit Negara Dalam Pengawasan Anggaran

Dalam Survey keterbukaan Anggaran (OBS) menguji seberapa efektif pengawasan yang dilakukan oleh legislatif dan lembaga audit keuangan (SAIs). Institusi tersebut memainkan peran yang sangat penting – dan lembaga yang sering diabaikan oleh pemerintah nasional-dalam perencanaan dan pengawasan implementasi anggaran.

Open Budget Survey (OB) menilai apakah legislatif melakukan pengawasan anggaran secara efektif melalui pengukurankinerja di 11 indikator, termasuk konsultasi dengan eksekutif sebelumnya memasukkan draft anggaran, kapasitas riset, pembahasan seluruh kebijakan anggaran, ketersediaan pembahasan dan ketepatan waktu persetujuan anggaran, jaminan regulasi untuk merubah proposal anggaran, persetujuan perubahan anggaran belanja dan kelebihan pendapatan, wewenang penambahan anggaran, kewenangan menyetujui anggaran darurat dan memeriksa laporan audit.

Open Budget Survey (OBS) menilai apakah insitusi audit keuangan diberikan kekuasaan yang efektif untuk mengawasi anggaran secara efektif dengan menggunakan empat indikator: otoritas untuk mengganti kepala lembaga audit, jaminan aturan mengaudit keuangan publik, ketersediaan sumber pembiayaan dan ketersediaan tenaga audit yang profesional

Rekomendasi

International Budget Partnership (IBP) merekomendasikan kepada Indonesia untuk melaksanakan beberapa hal dalam meningkatkan pengawasan anggaran:

- Legislatif harus unit kajian anggaran khusus untuk membantu menganalisis anggaran, eksekutif harus meminta persetujuan dari legislatif untuk menggunakan anggaran dari kelebihan pendapatan yang diperoleh selama pelaksanaan anggaran (lihat pertanyaan 97 dan 104 di pertanyaan OBS).
- Anggaran untuk lembaga audit keuangan harus ditentukan oleh legislatif, dan keuangannya harus sesuai dengan sumber daya yang dibutuhkan oleh lembaga audit untuk melaksanakan mandatnya (lihat pertanyaan 93 di kuesioner OBS).

Indonesia memiliki pengawasan anggaran yang kuat dan lemah dalam keterlibatan publik dibandingkan dengan negara lainnya di Southeast Asia.

Negara	Kekuatan Legislatif	Kekuatan Lembaga Audit	Keterlibatan Publik
Cambodia	Tengah	Tengah	Lemah
Timór-Leste	Tengah	Kuat	Lemah
Indonesia	Kuat	Kuat	Lemah
Malaysia	Tengah	Kuat	Lemah
Myanmar	Lemah	Lemah	Lemah
Philippines	Tengah	Kuat	tengah
Thailand	Kuat	Kuat	Lemah
Vietnam	Kuat	Kuat	Lemah

Ket: **Kuat**: skor rata-rata di atas 66 dari 100, **Tengah**: skor rata-rata antara 34 dan 66, **Lemah** skor rata-rata dibawah 34.

Kesempatan Partisipasi Publik

Pengalaman riset dan advokasi masyarakat sipil selama lebih dari 15 tahun telah menunjukkan bahwa transparansi sajatidak cukup untuk meningkatkan tata kelola.. Transparansi yang disertai kesempatan bagi partisipasi publik dalam penganggaran dapat memaksimalkan hasil yang positif jika disertai dengan keterbukaan penganggaran. Oleh karena itu, survey keterbukaan anggaran menilai kesempatan yang disediakan kepada publik untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan anggaran di tingkat Nasional. Kesempatan seperti itu bisa disediakan dalam proses penganggaran oleh eksekutif, legislatif dan lembaga audit.

Rekomendasi

International Budget Partnership merekomendasikan Indonesia untuk memperluas keterlibatan publik dalam penganggaran berdasarkan indikator survey keterbukaan anggaran yang menunjukkan masih lemah (lihat tabel dibawah dan pertanyaan 114-123 dan 125 pada OBS Kuesioner).

Berdasarkan indikator ini Based Open Budget Survey 2012 menemukan bahwa kesempatan bagi publik untuk berpartisipasi dalam proses penaggaran di indonesia masih lemah.

Indonesia memiliki ruang yang lebih banyak untuk meningkatkan partisipasi publik

Kebutuhan	Temuan
Proses Sebelum ada Konsultasi	
Syarat formal untuk partisipasi publik (Q114)	Tidak ada
Artikulasi tujuan partisipasi publik (Q115)	Tidak ada
Komunikasi temuan Lembaga Audit (SAIs) dan publikasi laporan hasil audit (Q124)	Ada dan kuat
Proses Konsultasi	
Mekanisme yang dikembangkanoleh eksekutif untuk partisipasi selama perencanaan	Tidak ada
Dengar pendapat di legislatif pada kerangka ekonomi makro (Q119)	Tidak ada
Dengar pendapat di Legislatif pada masing-masing lembaga(Q120)	Ada tapi lemah
Kesempatan publik di legislatif untuk testimoni selama dengar pendapatanggaran (Q121)	Ada tapi lemah
Mekanisme yang dikembangkan oleh eksekutif untuk berpartisipasi selama pelaksanaaananggaran (Q117)	Tidak ada
Pengembangan mekanisme oleh SAIs untuk partisipasi dalam agendaaudit (Q123)	Ada tapi lemah
Proses Setelah Konsultasi	
Tanggapan oleh eksekutif dalam menggunakan input yang diberikan oleh publik (Q118)	Tidak ada
Laporan yang dikeluarkan legislatif pada dengar pendapat anggaran (Q122)	Ada tapi lemah
Tanggapan oleh SAIs dalam menggunakan masukan publik (Q125).	Tidak ada

Deskripsi Survey, Metodologi, Realibilitas, Informasi dan Kontak Peneliti

Penelitian OBS adalah penelitian berdasarkan fakta, instrumen penelitian yang digunakan sangat mudah dan mengobservasi kejadian untuk menilai apa yang terjadi dalam praktiknya. Kesimpulan penelitiandidukung oleh kutipan dan komentar, termasuk referensi dokumen penganggaran, peraturan dan dokumen publik lainnya; pernyataan pejabat publik pemerintah atau dari interview langsung dengan pejabat pemerintah atau pihak-pihak terkait lainnya. Survey dikompilasi dari kuesioner yang sudah dilengkapi dari semua negara kemudian dikompilasi oleh ahli anggaran independen yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Semua kuesioner masing-masing negara kemudian di review oleh ahli (*disamarkan/anonim*) yang juga tidak memiliki hubungan dengan pemerintah. Selanjutnya, IBP mengundang pemerintah nasional untuk memberikan komentar mengenai draft hasil dari survey dengan mempertimbangkan komentar tersebut sebelum hasil survey di finalkan. Proses pelaksanaan penelitian untuk 2012 dilakukan selama 18 bulan antara bulan Juli 2011 sampai Desember 2012 dan melibatkan hampir 400 ahli.

OBS menyajikan sumber-sumber data yang terpercaya pada pada praktik transparansi penganggaran nasional untuk pemerintah, praktisi pembangunan, media dan masyarakat. Pengguna hasil survey adalah termasuk Open Government Partnership (OGP) Collaborative Africa Budget Reform Iniciative, INTOSAI, World Bank pada Worldwide Governance Indicator, dan beberapa lembaga bantuan bilateral dan lembaga internasional dan multilateral. Publikasi OBS tahun 2012 memperkuat posisi sebagai sumber data global dalam transparansi, partisipasi dan akuntabilitas anggaran.

Penyelesaian penelitian OBS di Negara ini dilakukan oleh Lukman Hakim dan Yuna Farhan Sekretariat Nasional-Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Mampang Prapatan IV Jln K. No 37 Jakarta Selatan-Indonesia (seknas_fitra@yahoo.com). Pemerintah indonesia telah menyampaikan komentar pada draft hasil kuesioner OBS.